




**DAERAH LAIN HARUS BELAJAR KE DIY**

## Reformasi Birokrasi Harus Berkelanjutan

**YOGYA (KR)** - Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dilakukan secara berkelanjutan, terarah serta diimbangi dengan akuntabilitas kinerja yang baik. Semua itu harus dilakukan mengingat tantangan yang saat ini dihadapi semakin kompleks. Oleh karena itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB), terus mendorong pemerintah daerah untuk melakukan reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Mengingat, adanya reformasi birokrasi akan mempercepat pelayanan publik sekaligus ma-



**KINERJA BIROKRASI**  
Melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di DIY

Cakupan	Predikat
o Penda DIY	AA
o Bantul	A
o Sleman	A
o Kulonprogo	A
o Kota Yogyakarta	BB
o Gunungkidul	BB

Sumber : Menpan-RB      Grafik JOS

suknya investasi. "Efisiensi harus senantiasa didorong untuk perbaikan indikator kinerja Penda dan perangkat daerah yang menjadi lebih berorientasi pada hasil relevan dan terukur. Seperti yang sudah dilakukan oleh Penda DIY. Akuntabilitas kinerja Penda DIY sudah sangat bagus, dan telah melakukan banyak efisiensi. Hal itu bisa dilihat dari 3.145 kegiatan atau program bisa dipangkas menjadi sekitar 850-an program, semua itu sangat bagus. Untuk itu saya minta pimpinan daerah di seluruh Indonesia untuk belajar bahkan meniru pelaksanaan tata kelola pemerintahan di DIY, khususnya untuk mempercepat reformasi birokrasi," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Tjahjo Kumolo saat memberikan pengarahannya dalam acara penilaian AKIP dan Reformasi Birokrasi (RB) Penda DIY dan Pemkab/Kota se-DIY di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Senin (4/11).  
 Terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Tjahjo mengapresiasi keberhasilan Penda DIY yang telah mendapat predikat AA.  
 \* Bersambung hal 7 kol 1

Instansi	Nilai B
.....	<input type="checkbox"/> Nega
.....	<input type="checkbox"/> Posi
.....	<input type="checkbox"/> Netra

## Reformasi .....

Selain itu MenpanRB juga mengapresiasi kinerja 3 kabupaten/kota di DIY yaitu Bantul, Sleman, dan Kulonprogo yang mendapatkan predikat A serta 2 Kabupaten/kota yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul mendapatkan predikat BB. Dengan adanya prestasi tersebut, Tjahjo menilai Pemda DIY layak menjadi role model bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Untuk itu, dirinya berharap daerah lain bisa menjadikan DIY sebagai tujuan studi tiru. Tentunya semua itu harus diimbangi dengan keseriusan Pemda DIY untuk mempertahankan capaiannya, supaya bisa meningkatkan menjadi lebih sempurna.

"Semuanya harus terus solidkan birokrasi, dengan begitu DIY bisa menjadi contoh nasional dengan anggaran meningkat, hasilnya ada. Sehingga bisa daerah lain harus melakukan studi tiru dengan DIY jangan hanya banding," ujarnya

Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyadari perubahan merupakan sebuah keniscayaan yang harus dihadapi, oleh karenanya pelaksanaan reformasi tidak mungkin berhenti dan harus terus dilakukan untuk menjawab tuntutan zaman. Mensikapi kondisi yang terus berubah dan tantangan yang semakin kompleks, Pemda DIY senantiasa berjalan seiring dengan kebijakan Kementerian PAN & RB terkait pada

pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi secara berkelanjutan.

"Kemitraan strategis ini sangat bermanfaat dalam hal pengelolaan lembaga yang terus berubah melalui langkah-langkah transformatif hingga kemudian mendapat predikat 'AA'. Bahkan Pemda DIY telah menindaklanjuti arahan Bapak Presiden tentang efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, itu merupakan komitmen yang terus kami pegang untuk menegaskan akuntabilitas adalah keniscayaan menghadapi masa depan," tutur Sultan HB X dalam Pembukaan Penilaian AKIP dan RB Pemda DIY serta Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Gedhong Pracimosono, Senin (4/11).

Terkait dengan strategi pencapaian hasil AKIP DIY selama ini, Sultan HB X menegaskan capaian nilai 'AA' merupakan parameter yang menunjukkan bahwa perjalanan reformasi birokrasi yang senantiasa dijalankan hingga detik ini adalah proses yang panjang. Hal itu, merupakan penanda tahapan yang selama ini dilakukan pemerintah daerah sudah pada jalur yang benar. Untuk itu, Pemda DIY menyatakan dalam sebuah sistem akuntabilitas yang baik maka perbaikan tidak dapat dilakukan sepotong-sepotong (parsial) tetapi harus dilakukan secara terintegrasi. Faktor pendongkrak lainnya

adalah menerapkan Performance Based Organization. Termasuk didalamnya komitmen terhadap reformasi birokrasi melalui pengelolaan organisasi yang dinamis, fleksibel dan adaptif. Terutama, untuk memastikan manfaat program dirasakan langsung oleh masyarakat atau making delivered. Pemda DIY sangat berkomitmen agar hasil pembangunan benar-benar berdampak dan memiliki daya guna, melalui sejumlah langkah-langkah strategis.

"Dua contoh cara berpikir asimetris dalam pengelolaan anggaran adalah ketika daerah lain ramai membicarakan kinerja serapan anggaran pada waktu itu, Pemda DIY justru telah mulai memberikan penghargaan kepada instansi yang mampu mewujudkan output, namun melakukan efisiensi. Dengan kata lain, tidak harus menghabiskan anggaran. Contoh lain, ketika kemampuan fiskal suatu daerah naik biasanya akan diikuti dengan jumlah kegiatan yang ikut membengkak pula, maka kami justru berpikir sebaliknya. Pada tahun 2013 APBD DIY sekitar Rp 3,6 triliun dengan kegiatan Sebanyak 3.145 sementara pada 2017 ketika APBD DIY telah mencapai angka sekitar Rp 5,4 triliun kegiatannya justru dipangkas menjadi 850-an kegiatan," imbuh Raja Kraton Yogyakarta ini.

(Ria/Ira)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Badan Perencanaan Pembangunan			
3. BKPP			
4. BPKAD			

Yogyakarta, 11 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005